

August 2018

## Prospek Diplomasi Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan: Refleksi Teoritis Kajian Kapitalisme Konsumen di Era Susilo Bambang Yudhoyono

Ziyad Falahi

*Al Azhar Institute*, ziyad.falahi1988@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global>

---

### Recommended Citation

Falahi, Ziyad (2018) "Prospek Diplomasi Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan: Refleksi Teoritis Kajian Kapitalisme Konsumen di Era Susilo Bambang Yudhoyono," *Global: Jurnal Politik Internasional*: Vol. 17 : No. 1 , Article 6.

DOI: 10.7454/global.v17i1.24

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol17/iss1/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Global: Jurnal Politik Internasional by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**PROSPEK DIPLOMASI INDONESIA DALAM KERJASAMA SELATAN-  
SELATAN: REFLEKSI TEORITIS KAJIAN KAPITALISME KONSUMEN DI  
ERA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Ziyad Falahi**

**Al Azhar Institute**

**E-mail: ziyad.falahi1988@gmail.com**

***Abstrak***

*This paper analyzes the consumer capitalism in Susilo Bambang Yudhoyono's administration and its influence to Indonesian diplomacy. Study of consumer capitalism is relevant in analyzing the case of South-South cooperation that reflects new model of international division of labor. Consumer capitalism divides Southern countries into two types, producers, such as China, India, Brazil, and Russia, and consumers, such as Indonesia. Indonesian government's plan to be vital part of South-South Cooperation needs to be questioned, considering Indonesia's economy that heavily relied on consumption. Consumer capitalism can become a buffer of the Indonesian economy to face the 2008 global crisis, but its implications in the future will only marginalized Indonesia.*

**Kata Kunci:**

*Consumer Capitalism, Susilo Bambang Yudhoyono, South-South Cooperation, Diplomacy*

Kajian mengenai Kapitalisme Konsumen (*Consumer Capitalism*)<sup>1</sup> hingga saat ini belum mendapatkan ruang pembahasan yang serius dalam studi Hubungan Internasional. Hal ini wajar karena penekanan Kapitalisme Konsumen selama ini lebih diletakkan pada analisis budaya dan cenderung kurang praktis dalam meninjau perilaku negara. Padahal, Kapitalisme Konsumen dewasa ini menjadi tema diskursus yang ramai dibicarakan terutama oleh para akademisi kiri alternatif. Hal yang sering didengungkan dalam studi Hubungan Internasional adalah Kapitalisme yang berbasis pada logika produksi yang diasumsikan lebih nyata atau terukur (*tangible*) karena secara gamblang menunjukkan adanya konstelasi hubungan antar-negara atau perusahaan transnasional. Problem kekurangempirikan (*less empirical*) menjadi alasan bagi termarginalnya kajian Kapitalisme Konsumen.<sup>2</sup>

Budaya konsumerisme sebagai budaya yang direproduksi oleh Kapitalisme tingkat lanjut secara gradual telah turut mengkonstruksi perilaku negara. Salah satu indikator yang krusial terletak pada bagaimana negara kontemporer seolah terpecah menjadi dua, yaitu: negara yang mengandalkan pada sektor produksi dan negara yang pasif dan sangat tergantung pada sektor konsumsi. Basis perekonomian dapat dijadikan sebagai indikator meskipun pembagian ini tidak bisa secara mudah dilakukan. Implikasi nyata dari pembagian tersebut dalam studi Hubungan Internasional dapat terlihat saat kita menyaksikan bagaimana kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dibangun. Dalam kasus tersebut terlihat bagaimana konsumerisme secara lebih lanjut mendorong adanya pola kerjasama yang terancam diwarnai oleh ambisi kepentingan yang tidak berimbang. Kemunculan Cina, India, Rusia, dan Brazil (BRIC) merefleksikan adanya kelas kapitalis baru di dalam negara-negara Selatan. Kita dapat menyaksikan bagaimana dominasi keempat negara ini dalam perdagangan internasional bisa tercipta karena tingkat produktivitas yang mereka miliki lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara Selatan yang lain.

Lalu, bagaimana jika negara yang dominan tersebut berkerjasama dengan negara yang basis perekonomiannya sangat konsumeristik seperti Indonesia? Kerjasama Selatan-Selatan bisa menjadi ancaman bagi Indonesia. Indonesia sendiri berulang kali menyatakan optimismenya dalam forum kerjasama ini. Dalam ajang *Crans Montana Forum* di Brussel, delegasi Indonesia menyatakan bahwa “Indonesia berada di garda terdepan dalam kerjasama pembangunan di negara berkembang selama ini dan pengalaman kita layak dijadikan contoh.”<sup>3</sup> Optimisme tersebut perlu dipertanyakan seiring dengan abstainnya produk nasional yang dapat bersaing di dalam perdagangan global. CAFTA, sebagai salah satu contoh Kerjasama Selatan-Selatan, misalnya, justru menempatkan Indonesia sebagai negara konsumen terhadap produk-produk Cina. Terlihat kentalnya aroma *inferiority complex* yang tertuang dalam keengganannya untuk mengaktualisasi produk nasional. Selain itu, kita bisa melihat terdistorsinya aspek kemandirian dalam Kerjasama Selatan-Selatan karena Indonesia dalam beberapa forum justru mengajak negara-negara Utara untuk turut mendukung kerjasama sekaligus menjadi bagian di dalamnya.<sup>4</sup>

Dari latar belakang tersebut, kita dapat menyimak bahwa eksistensi Kapitalisme Konsumen sebagai sebuah diskursus mulai hadir di dalam sistem ekonomi Indonesia. Secara umum, sistem konsumerisme akan mematikan sektor produksi sehingga dapat mengancam kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan, apalagi dengan

semakin banyaknya negara Selatan yang mulai meningkatkan produktivitas dengan memperkuat produk nasionalnya. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah sejauh mana perekonomian konsumerisme dapat menjadi penghambat tercapainya kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan?

Guna membantu terkomunikasikannya gagasan tersebut, tulisan ini dibagi dalam enam bagian besar. Bagian pertama menjadi pendahuluan yang secara implisit terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tesis, dan sistematika penulisan. Sedangkan bagian kedua mengupas secara tuntas trajektori teoritik mengenai Kapitalisme Konsumen. Selanjutnya, dalam bagian ketiga, dilakukan proses penjelajahan sekaligus pemaparan data-data empirik untuk mendukung argumentasi bahwa ada Kapitalisme Konsumen yang menjangkiti perekonomian Indonesia. Dalam bagian keempat dijelaskan proses transformasi Kerjasama Selatan-Selatan dan diplomasi Indonesia di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di bagian selanjutnya, bagian kelima, dilakukan elaborasi gagasan mengenai adanya logika eksploitasi dalam Kerjasama Selatan-Selatan. Sedangkan bagian terakhir adalah kesimpulan.

### **Melacak Eksistensi Kapitalisme Konsumer**

Mengapa Kapitalisme yang sempat diramalkan oleh Karl Marx akan runtuh justru semakin kuat? Jean Baudrillard menjelaskan bahwa Kapitalisme telah bergeser dari eksploitasi basis produksi menuju ke eksploitasi dalam logika konsumsi.<sup>5</sup> Dahulu, penindasan bersifat langsung, frontal, keras, dan mengeksploitasi secara *tangible*, namun saat ini penindasan berlangsung secara *soft*, tidak langsung, dan *intangible* karena dilakukan dengan membujuk kelas proletar melalui ekstasi gaya hidup dan kesenangan artifisial. Bahkan, *saking* halusnyanya, penindasan konsumerisme justru menjadi kenikmatan bagi yang ditindas, apalagi dengan daya seduktif iklan yang menghegemoni sekaligus mengguncang ketidaksadaran konsumen. Dengan bahasa yang berbeda, Lyotard menyebut Kapitalisme Konsumen sebagai Kapitalisme Bujuk Rayu (*Passionate Capitalism*) dimana permainan tanda, melalui iklan dan propaganda, membuat kelas tertindas tidak merasa tertindas.<sup>6</sup>

Jika mengamati secara artifisial maka terlihat seolah-olah Kapitalisme Konsumen merupakan Kapitalisme yang baik hati. Namun, dalam diskursus Kapitalisme Konsumen, kita dapat menyaksikan bahwa sekarang tidak hanya buruh saja yang dieksploitasi tetapi juga konsumen yang berada di luar zona produksi.<sup>7</sup> Saat

ini, hampir semua pelaku ekonomi merasakan jeratan eksploitasi lembut yang dilakukan oleh Kapitalisme. Oleh karena itu, ketika ada kelas menengah yang merasa nyaman dengan Kapitalisme sesungguhnya menunjukkan kedigdayaan strategi Kapitalisme Konsumen. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya aspek kenikmatan inilah yang membuat cita-cita revolusi proletariat semakin hari gaungnya menjadi semakin tidak terdengar.<sup>8</sup>

Awal kemunculan Kapitalisme Konsumen masih menjadi perdebatan diantara para pemikir kiri. Beberapa pemikir seperti Daniel Bell dan Frederick Jameson mengkaitkan konsumerisme dengan globalisasi yang muncul pada dekade 1970-an. Globalisasi menjadi indikator lahirnya budaya pop yang disebarluaskan oleh teknologi virtual. Daniel Bell menyebut Kapitalisme Konsumen sebagai *Late Capitalism* yang berwajah ganda, yaitu: memunculkan budaya yang unik dan berbeda namun disisi lain juga memunculkan budaya pop.<sup>9</sup> Sedangkan Frederick Jameson menyebut Kapitalisme Konsumen sebagai *Post-Industrial Capitalism* dimana sektor produksi barang dan jasa bukan lagi pimadona dalam perekonomian dan digantikan oleh sektor konsumtif.<sup>10</sup>

Dengan demikian, siapakah yang sesungguhnya menjadi agen dalam Kapitalisme Konsumen? Pertanyaan ini juga menuai perdebatan. Penyebaran Kapitalisme Konsumen yang bersifat *soft* merupakan alasan kuat mengapa pertanyaan ini sukar untuk dijawab secara empiris. Hardt dan Negri menjelaskan bahwa Kapitalisme global menyebar sebagaimana imperium.<sup>11</sup> Penyebaran tersebut hanya berwujud sebagai suatu struktur *multitude* yang *intangible* yang area kekuasaannya tidak bisa digambarkan secara *rigid*. Hal ini sama dengan ketika Michael Foucault menjelaskan genealogi kekuasaan dalam era kontemporer, dimana lokus *power* dalam Kapitalisme Konsumen tersebar dan tidak terkuantifikasi.<sup>12</sup> Namun, penekanan pada penindasan tetap sama, yakni: bagaimana Kapitalisme mengorganisasi dan mendisiplinkan manusia melalui serangkaian rezim yang dianut secara tidak sadar.<sup>13</sup>

### **Kapitalisme Konsumer di balik Kerjasama Selatan-Selatan**

Tinjauan teoritik tersebut menyisakan satu pertanyaan: bagaimana Kapitalisme Konsumen dapat masuk dalam studi Hubungan Internasional yang lebih menekankan pada politik tingkat tinggi. Konsumsi, dalam tataran semiotik, didefinisikan berdasarkan relasi pertanda yang abstrak. Jalan keluar muncul ketika kita dapat mengkaitkan Kapitalisme Konsumen dengan pembagian negara berdasarkan basis produksinya. Pengklasifikasian negara tersebut dapat menunjukkan adanya pembagian

kelas dalam hubungan ekonomi antar-negara. Secara teoritik, adanya Kapitalisme Konsumen dapat menghambat dan bahkan merusak niatan luhur dari Kerjasama Selatan-Selatan, yang menjadi representasi konsumen. Adanya kerjasama berbeda kelas dalam Kerjasama Selatan-Selatan seolah mengembalikan lagi hukum penindasan dalam Kapitalisme, dimana kerjasama senantiasa bernuansa *zero-sum* ketika dimainkan oleh dua pihak yang tidak seimbang. BRIC dan beberapa negara Selatan mapan lain merupakan negara Kapitalis baru sekalipun mengatasnamakan solidaritas Selatan. Sebaliknya, sekalipun Indonesia memperoleh investasi dalam jumlah yang masif, namun konsumerisme menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap negara Selatan lain yang lebih mapan.

Konstelasi ekonomi politik internasional kembali dimarakkan oleh kebangkitan diskursus Kerjasama Selatan-Selatan era kontemporer. Ernesto Laclau dan Chantall Moufee menunjuk beberapa negara Amerika Selatan seperti Venezuela dan Bolivia yang diharapkan mampu mengembalikan lagi semangat Kerjasama Selatan-Selatan yang sempat terbengkalai.<sup>14</sup> Dalam skala regional, refleksi kerjasama ini dicontohkan dengan kehadiran Mercosur, ALBA, Bank Selatan, dan ASEAN. Namun, ternyata Kerjasama Selatan-Selatan kontemporer lebih inklusif dalam mengimplementasikan diplomasi resistensinya. Model resistensi dalam Kerjasama Selatan-Selatan terbukti dilakukan setengah hati karena masih mengharapkan adanya kesepakatan dengan negara-negara Utara untuk dapat memberikan stimulus.

Implementasi Kerjasama Selatan-Selatan sedikit terhambat karena negara Selatan kini tidak hanya dihuni oleh negara dengan kapabilitas dan tujuan yang sama. Kemunculan BRIC memunculkan pergeseran peta politik dalam perekonomian global yang membuat Kerjasama Selatan-Selatan menjadi asimetris. Bahkan, muncul komunitas di dalam komunitas seiring dengan dilaksanakannya KTT BRIC yang bersifat eksklusif. KTT BRIC merupakan modus kerjasama diantara negara-negara BRIC yang cukup berimbang secara kapabilitas. Karena itu, sudah tepat ketika Indonesia yang berbasis pada sektor konsumen tidak berhasil masuk dalam BRIC. Jika Indonesia masuk di dalamnya maka Indonesia dipastikan akan mengalami defisit neraca perdagangan.

Superioritas Cina menunjukkan bahwa Kerjasama Selatan-Selatan juga perlu disikapi secara lebih *prudent*. Meskipun Cina lebih senang dengan sebutan negara Selatan, sebutan negara Kapitalis baru lebih tepat untuk diberikan. Wajar jika kemudian CAFTA justru menjadi ancaman bagi kerjasama Selatan-Selatan yang

bahkan sudah dapat dirasakan oleh negara konsumen seperti Indonesia. Sebagai contoh, pengusaha batik otomatis terpukul dengan membanjirnya batik produk Cina yang memiliki kualitas lebih baik dengan harga lebih murah. Bahkan, perajin batik Indonesia sudah diboyong ke Cina untuk membantu desain. Motif batik berasal dari Indonesia namun diproduksi di Cina. Ketua Umum Asosiasi Keuangan Mikro Indonesia, Aries Muftie, menyatakan bahwa seiring dengan membanjirnya produk Cina, kecintaan terhadap produk dalam negeri mulai melemah. Sebagai implikasi, di dalam kerangka CAFTA, Indonesia hanya mengekspor bisa bahan baku dan sumber daya alam ke Cina. Tak pelak, neraca perdagangan Indonesia terhadap Cina kemudian mengalami defisit. Contoh CAFTA mengindikasikan bahwa Kerjasama sesama Selatan berpretensi memunculkan penjajahan diantara negara-negara Selatan sendiri yang didorong oleh hasrat surplus produksi dari negara Selatan yang sedang dalam proses menuju Kapitalis.

Beberapa pakar ekonomi menekankan bahwa model kerjasama Selatan-Selatan kontemporer didorong oleh semangat Neo-sosialisme. Pengambilan kata neo sebagai ideologi resistensi merupakan aspek yang menarik karena ternyata sisi aksiologisnya jauh berbeda dengan Sosialisme dalam pengertian fundamental. Dalam Neo-sosialisme, Kerjasama Selatan-Selatan didorong oleh logika interdependensi yang tentu berbalik dengan logika dependensi yang senantiasa dipakai gerakan Sosialisme tahun 1960-an dan 1970-an. Bahkan, paradigma Kerjasama Selatan-Selatan sangat mengedepankan sektor industri, padahal dalam alam pikir dependensi, sebagaimana disebutkan oleh Andre Gunderfrank, industrilisasi akan senantiasa menyerap sumber daya alam negara Selatan.<sup>15</sup> Neo-sosialisme, jika diamati lebih jauh, terkesan lebih mengadopsi pemikiran jalan tengah yang diprakarsai oleh Anthony Giddens.<sup>16</sup> Sosialisme model Giddens lebih bersikap moderat dan dalam derajat tertentu mempercayai preskripsi liberal, seperti halnya demokratisasi. Sosialisme jalan tengah sejatinya sangat percaya dengan industrialisasi dan bantuan luar negeri sehingga kemiskinan dan keterbelakangan dalam pemikiran Neo-sosialisme inheren dengan kemiskinan dan keterbelakangan dalam benak Kapitalisme-Neoliberal yang acapkali diukur dari indikator-indikator seperti volume perdagangan makro-ekonomi. Dengan demikian, terlihat banyak unsur kapitalistik dibalik Neo-sosialisme a la Kerjasama Selatan-Selatan.

Oleh karena Kerjasama Selatan-Selatan dianggap stagnan maka muncullah gerakan alternatif sebagai resistensi terhadap Kapitalisme global. Model gerakan ini

tidak membawa panji-panji negara-bangsa, melainkan bersifat transnasional dan melibatkan komponen *society* seperti *World Social Forum* (WSF) yang turut berkontribusi dalam menggagalkan Konferensi WTO di Seattle. Selain WSF, Zapatista menjadi contoh yang unik dalam membedah pandangan kita mengenai gerakan transnasional kontemporer yang anti-negara. Zapatista muncul sebagai suatu gerakan yang tidak pernah menggunakan cara-cara politis secara legal-formal. Bahkan, Zapatista merupakan gerakan yang hanya berusaha mengganggu pemerintahan namun menyatakan ketidaksediaannya untuk masuk dalam pemerintahan. WSF dan Zapatista mengkritik peran negara Selatan yang diasumsikan tidak mampu lagi menghadang jeratan Kapitalisme global.

Paradigma yang mulai bergeser ini menunjukkan pentingnya untuk mempertanyakan kembali urgensi dari Kerjasama Selatan-Selatan secara lebih jauh. Berbeda dengan awal mula Kerjasama Selatan-Selatan yang dapat dilacak dalam Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok sekitar tahun 1950-an, pada masa kejayaannya, Kerjasama Selatan-Selatan mengisyaratkan sebuah resistensi terhadap negara-negara Utara dengan berdiplomasi secara mandiri. Namun, kini hal tersebut berubah lantaran Kerjasama Selatan-Selatan kontemporer tidak lagi menunjukkan keterikatan yang kuat diantara sesama negara Selatan dan malah terjadi divergensi kepentingan ekonomi. Kita bisa mengambil contoh ketika G-77 sebagai forum negara berkembang ternyata kesulitan untuk mencapai konsensus. Bahkan, diciptakan *backbone* dengan munculnya G-24 untuk lebih menyederhanakan mekanisme pengambilan keputusan di G-77.<sup>17</sup> Kini, malah lebih banyak negara Selatan yang tertarik untuk masuk ke dalam G-20 yang didalamnya banyak negara maju karena dianggap lebih menguntungkan secara ekonomis.

Menelusuri kembali jejak Kerjasama Selatan-Selatan menjadi lebih menarik jika melihat siklus perkembangan ekonomi global kontemporer. Robert Jackson dan George Sorensen menekankan bahwa perekonomian global pasca terjadinya Krisis tahun 2008 telah memasuki era ekses Neoliberalisme dengan ditinggalkannya preskripsi *Washington Consensus*. Diasumsikan demikian karena periode pasca Krisis tahun 2008 ditandai dengan kecenderungan mulai pudarnya kepercayaan negara terhadap *market-led development*.<sup>18</sup> Bahkan, AS sebagai negara yang dalam sejarah paling lantang menyuarakan semangat anti-intervensi negara, ternyata juga mengeluarkan kebijakan *bailout* untuk memperbaiki perekonomian domestiknya pasca Krisis tahun 2008. Apakah di era *post-Washington Consensus* terbuka ruang



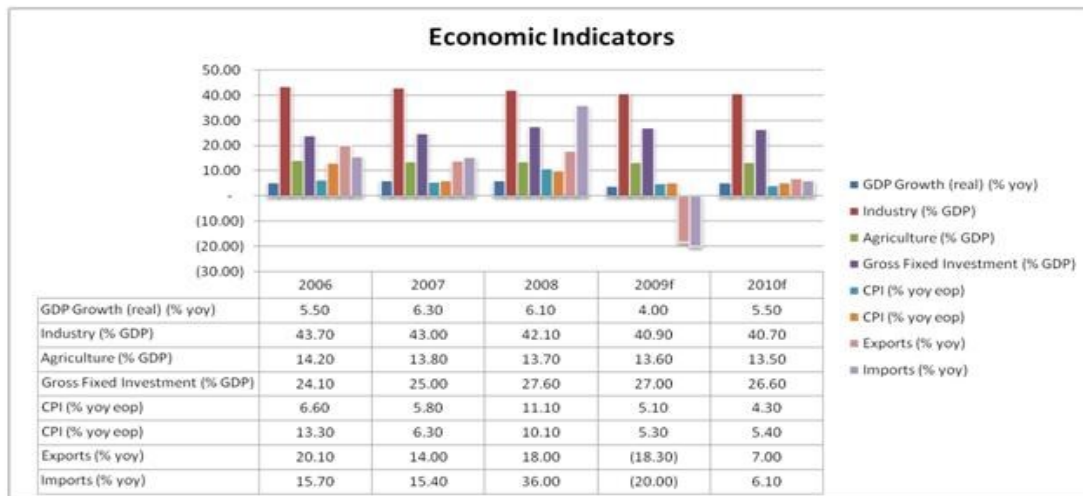
untuk diplomasi Selatan-Selatan mengingat munculnya berbagai *free trade area* dalam skala regional menunjukkan bahwa rezim pasar bebas masih mapan. CAFTA, GCC, dan Mercosur memperlihatkan adanya ancaman pasar bebas yang dapat mendistorsi arti penting intervensi negara, meskipun pasar bebas tersebut hanya terjadi dalam skala regional.<sup>19</sup>

### **Anatomi Struktur Konsumerisme dan Posisi Tawar Diplomasi Indonesia**

Dalam konteks perdagangan antar-negara, Kemunculan BRIC menjadi wajah positif dari Kapitalisme Konsumen. Namun, disisi lain, kemunculan Indonesia merupakan adanya alienasi.<sup>20</sup> Alienasi menunjukkan bagaimana kelas tertindas terasing dari kepemilikan lahan produksi. Refleksi konsep alienasi tersebut akan membantu dalam menganalisis sebab kenapa “*human do not make history under condition of their own choosing.*” Dalam konteks Kapitalisme Konsumen, budaya konsumerisme Indonesia merefleksikan adanya *keteralienasian* tersebut.

Indonesia secara statistik sangat mengandalkan pada ekonomi berbasis konsumerisme. Pada masa krisis saat ini, sektor konsumsi menjadi jawaban satu-satunya untuk membantu mengangkat kembali kondisi ekonomi. Karena itu, kendati berada dalam kondisi krisis, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di atas enam persen. Bersama Cina dan India, perekonomian Indonesia tercatat masih bisa tumbuh positif di tengah krisis global. Dalam Triwulan II-2009, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 3,7% setelah pada triwulan sebelumnya mencatat 4,4%. Pada Triwulan III tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,2% atau membaik dari perkiraan semula yang hanya 3,9%. Secara keseluruhan tahun 2009, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh pada kisaran 4%-4,5%. Angka pertumbuhan tersebut terlihat cukup meyakinkan di tengah lesunya perekonomian global.<sup>21</sup> Bahkan, muncul keyakinan bahwa dampak krisis 2008 ke Indonesia tidaklah signifikan. Apabila kita melihat ekonomi sebagai sebuah mesin dengan berbagai komponen, salah satu komponen yang penting adalah sektor konsumsi. Ini adalah elemen yang menyumbang lebih dari 60% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dalam jumlah penduduk sehingga kekuatan konsumsi dalam ranah domestiknya sangat kuat. Seperti Cina dan India, konsumsi domestik menjadi kekuatan dalam menghadapi krisis.<sup>22</sup>

Grafik 1. Pertumbuhan sektor konsumsi Indonesia<sup>23</sup>



Sementara itu dari Grafik 1 di atas justru dapat disimak bahwa momentum pertumbuhan di sektor industri tampaknya justru mengalami penurunan tipis. Proporsi sumbangan sektor industri terhadap pertumbuhan GDP menjadi hanya 40,7% dari proyeksi 40,9% di tahun 2009. Proporsi ini turun jauh dari 42,1% pada tahun 2008. Kondisi ini inheren dengan asumsi Frederick Jameson yang menjelaskan adanya transisi dari sektor industri menjadi pasca-industri yang minim dalam menyerap modal dan tenaga kerja. Sehingga lumrah ketika pada semester pertama tahun 2009 tercatat bahwa pertumbuhan sektor konsumsi di Indonesia cukup solid. Kondisi ini didukung oleh adanya pemilu legislatif dan presiden. Sektor konsumsi sangat diuntungkan dengan adanya perayaan akbar lima tahunan ini.

Konsumerisme di Indonesia memang erat kaitanya dengan gaya hidup moderen. Gaya hidup yang menjadi candu ini semakin merajalela seiring dengan adanya dukungan dari lembaga finansial seperti perbankan yang minim kontrol. Antusiasme perbankan tersebut merupakan hal lumrah mengingat pendapatan non-bunga yang diraih cukup menggiurkan. Kartu kredit yang disebut Baudrillard sebagai wujud alienasi konsumerisme bisa menggaet masyarakat untuk konsumtif melalui penawaran-penawarannya. Caranya pun bervariasi mulai dari pemberian diskon hingga *cash back*. Oleh karena itu, masyarakat yang sesungguhnya ditindas menjadi tergoda, pasalnya kenaikan transaksi pada even-even seperti liburan sekolah ataupun momen hari raya mencapai tiga puluh persen lebih besar jika dibandingkan pada bulan biasa.

Yang perlu dikhawatirkan adalah sektor konsumsi tersebut hanya dapat menjadi buffer perekonomian dalam jangka pendek sekaligus menihilkan adanya tujuan

pembangunan nasional. Dengan semboyan *one enemy million friends* Indonesia terkesan setengah hati dengan mengajak negara utara untuk masuk dalam Kerjasama Selatan-Selatan. Ketika diplomasi diartikan sebagai aksi untuk mencapai kepentingan nasional maka sektor konsumerisme hanya akan membuat diplomasi hanya sebagai reaksi. Dengan demikian, Indonesia ke depan hanya akan menjadi obyek dan bukan subyek dalam Kerjasama Selatan-Selatan.

### **Diplomasi Indonesia Era Susilo Bambang Yudhoyono dalam menghadapi Kerjasama Selatan-Selatan Kontemporer**

Dengan semboyan *one million freind zero enemy*, Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengangankan suatu dunia yang memungkinkan kerjasama Utara dan Selatan. Sebagaimana diungkapkan oleh Dino Patti Djalal, "Filosofi kerjasama antar-negara Presiden SBY ke Utara dan ke Selatan itu oke. Siapa pun yang pro-Indonesia, kita akan mengulurkan tangan." Dalam pertemuan G-33 di Jakarta 20 Maret 2007, terlihat Presiden Yudhoyono menonjolkan sisi *one million friend* ketimbang prioritasnyaa sebagai negara Selatan. Presiden SBY lebih antusias untuk mengajak negara-negara maju menghilangkan diskriminasi terhadap negara berkembang, terutama menyangkut perdagangan. Menteri Perdagangan Marie Pangestu juga sejalan dengan Presiden SBY mengenai perlunya negara Utara menyepakati forum multilateral terkait *special product*. Namun, terlihat dari serangkaian fakta diatas bahwa tuntutan Indonesia menunjukkan kurangnya independensi dalam mengoptimalkan Kerjasama Selatan-Selatan dan sangat membutuhkan bantuan dari negara maju.

Bahkan, KTT Doha yang hingga tidak terselesaikan dengan baik dapat berimplikasi pada semakin kurang percaya dirinya diplomasi Indonesia terkait Kerjasama Selatan-Selatan.<sup>24</sup> Ada beberapa kerugian yang harus diterima Indonesia jika tidak segera menyelesaikan putaran Doha. Kerugian pertama adalah munculnya ketidakpastian dan berkurangnya rasa kepercayaan kepada sistem multilateral. Kondisi ini tidak menguntungkan Indonesia sebagai negara berkembang yang harus menghadapi perdagangan bilateral. Kedua, negara tidak akan punya kekuatan untuk keluar dari keadaan krisis yang kemungkinan terjadi di masa mendatang. Ketiga, kalau WTO sebagai basis dalam kondisi lemah, kesepakatan-kesepakatan dagang dalam skala bilateral juga akan kurang maksimal. Negosiasi-negosiasi yang dihasilkan dalam forum bilateral akan menjadi tidak menguntungkan.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut pandangan kelompok swasta di Indonesia, Kerjasama Selatan-Selatan yang dilakukan pemerintah dinilai lebih menitikberatkan pada persoalan politik yang melibatkan kegiatan pemerintah, ketimbang penanganan masalah ekonomi. Karena lebih bersifat politis, kerjasama ini hanya terfokus pada kegiatan pemerintah dan tidak banyak melibatkan sektor swasta. Ini membuat jalinan *person to person* atau *company to company* antar-negara Selatan, khususnya Indonesia dengan negara-negara di Afrika dan Amerika Latin, sangat terbatas. Hal ini dipicu oleh banyaknya jumlah negara berkembang di Asia Pasifik, Afrika, dan Amerika Latin. Apalagi, negara-negara ini memiliki perbedaan, seperti di bidang stabilitas politik negara, ekonomi, sumber daya alam (SDA), faktor budaya, dan sumber daya manusia (SDM).<sup>26</sup> Bagi Indonesia, kendala hubungan perdagangan dengan negara-negara berkembang di Afrika dan Amerika Latin terutama adalah produk-produk nasional yang belum dikenal oleh pasar. Selain itu, letak geografis negara-negara berkembang yang berjauhan juga telah memicu timbulnya masalah di bidang pengangkutan, sistem pembayaran, dan dukungan keuangan. Faktor penghambat utama dari intensitas lainnya adalah homogenitas komoditas sehingga hubungan kerjasama antara negara-negara Selatan tidak komplementer. Faktor lainnya adalah jarak yang terlalu jauh menyebabkan biaya angkut dan infrastruktur akan mempengaruhi harga. Hal tersebut berimplikasi pada hubungan kerjasama yang tidak bersifat langgeng apalagi terinstitusionalisasi.

Masih minimnya Kerjasama Selatan-Selatan hanya akan menjadikan negara-negara Selatan sebagai partner kedua. Kepala Bappenas menyampaikan bahwa Kerjasama Selatan-Selatan hanyalah suatu bentuk alternatif kerjasama pembangunan untuk konteks negara berpenghasilan menengah (*middle income country*) seperti Indonesia. Padahal, dalam berbagai forum internasional peran Indonesia terlihat semakin strategis dalam penguatan Kerjasama Selatan-Selatan. Indonesia berpartisipasi secara aktif pada forum *Bogota High Level Event on South-South Cooperation and Capacity Development* bulan Maret 2010. Indonesia juga berperan dalam *Task Team on South-South Cooperation* sebagai salah satu dari lima belas anggota *Steering Committee* yang pertemuan pertamanya dilaksanakan bersamaan dengan *United Nations Development Cooperation Forum*.<sup>27</sup>

Meski demikian, agaknya tidak sepenuhnya salah ketika Presiden SBY berusaha untuk melibatkan dialog dengan negara-negara Utara karena kelemahan utama dari Kerjasama Selatan-Selatan adalah masalah pendanaan yang terbatas. Oleh karena itulah, keterlibatan negara-negara Utara dalam konteks pragmatisme dianggap penting

untuk memberikan stimulus pada Kerjasama Selatan-Selatan melalui dialog Utara-Selatan. Namun, ada kalanya prioritas memang perlu dikedepankan seiring dengan masih nihilnya dialog Utara-Selatan. Ketidakmampuan dialog Utara-Selatan untuk mengejawantah terjadi karena aspek struktural dalam perbedaan kesejahteraan yang bersifat membatasi institusionalisasi Kerjasama Selatan-Utara.

Kesempatan negara berkembang dalam menegakkan Kerjasama Selatan-Selatan menjadi lebih memungkinkan setelah lahirnya WTO dengan prinsip *one country one vote* sehingga bisa menjadi ajang pelampiasan ambisi. Namun, ternyata masih sulit untuk mengharapkan konvergensi kepentingan sesama negara Selatan. Bahkan, dalam konferensi G-33, negara-negara anggotanya masih berpikir dua kali untuk mengegolkan isu pertanian dalam WTO. Prioritas terhadap perjuangan isu pertanian tentu akan mengalami stagnasi dengan diplomasi *one enemy million friends* yang selama ini mengaburkan skala prioritas dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Lebih dari itu, Indonesia di era SBY lebih mengabdikan diri untuk memperoleh investasi sebesar-besarnya. Dalam pidatonya, SBY menekankan kebanggaan yang luar biasa atas masih layaknya Indonesia menerima pinjaman dari Bank Dunia. Investasi memang berdampak positif dalam menstimulus transformasi industri, namun jika tidak ditunjang dengan produk nasional yang kompetitifakan membuat Indonesia tidak dapat berbicara banyak dalam perdagangan internasional.

### **Kesimpulan**

Kapitalisme Konsumen sejatinya mereproduksi budaya dan nilai-nilai kapitalisme dalam paradigma ekonomi negara-negara Selatan sehingga masing-masing negara Selatan berhasrat untuk mengejar “surplus kapital.” Namun, infiltrasi dari reproduksi hasrat tersebut malah memunculkan budaya konsumerisme yang membuat sebagian negara Selatan seperti Indonesia teralienasi dengan lebih mengandalkan pada sektor konsumsi ketimbang sektor produksi. Disisi lain, muncul negara Selatan yang masif dalam produksi sehingga membuat adanya hubungan hirarkis dalam Kerjasama Selatan-Selatan. Tak pelak, Kerjasama Selatan-Selatan kontemporer menunjukkan realitas pembagian kerja internasional model baru yang menciptakan Kapitalisme Konsumen yang secara tidak langsung menciptakan divergensi kepentingan ekonomi di antara negara-negara Selatan.

Dilema imperialisme dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan tersebut tidak diasiasi oleh Indonesia dengan upaya aktif untuk membingkai produk nasional yang

kompetitif. Padahal, keberhasilan negara produsen seperti Cina, Rusia memanfaatkan Kerjasama Selatan-Selatan sejatinya sangat bergantung pada kompetitifnya produk nasional mereka. Namun, Indonesia dengan kepercayaan diri yang tinggi menyatakan kesanggupannya dalam bekerjasama dengan sesama negara Selatan dengan nuansa sektor konsumerismenya. Indonesia sangat membanggakan konsumsi sebagai penopang utama perekonomian meskipun sektor konsumsi justru akan menjadikan daya beli Indonesia sebagai obyek perekonomian negara lain. Dengan demikian, pemerintah perlu menyusun skala prioritas dalam Kerjasama Selatan-Selatan dengan memetakan secara komprehensif mana saja negara Selatan yang bisa menjadi sasaran ekspor produk nasional.

### Daftar Pustaka

- Arnsperger, C., *Critical Political Economy: Complexity, Rationality and The Logic of Post-Orthodox Pluralism*. London: Routledge, 2008.
- Bell, Daniel, *The Cultural Contradiction of Capitalism*. London: Basic Books, 1990.
- Baudrillard, Jean, *The Mirror of Production*. Cambridge: Polity Press, 1977.
- Brook, James, *Virtual Life: The culture and Politics of Information*. New York: City Light, 1995.
- Coronol, Fernando, "Toward a Critique of Globalcentrism: Speculations on Capitalism's Nature" dalam Comaroff, Jean, ed., *Millenial Capitalism and Culture of Neoliberalisme*. London: Duke University Press, 2008.
- Giddens, Anthony, *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press, 1984.
- Hadi, Syamsul dan Santi Dharmastuti, *Laporan Akhir Studi Kebijakan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan*. Ceacos UI, Bappenas, dan JICA, 2010.
- Hardt, Michael dan A. Negri, *Empire*. Harvard University Press, 2000.
- Harvey, David, "Is This Really the End of Neoliberalism?" dalam <<http://kasamaproject.org/2011/03/05/david-harvey-on-neoliberal-crisis-and-class-power/>> diakses 21 Maret 2011.
- Hayek, Freferick, *The Road of Serfdom*. Chicago University Press. 1944.  
<http://bataviase.co.id/node/325188>, diakses 3 Oktober 2011.
- <http://infopublik.depkominfo.go.id/?page=news&newsid=1742>, diakses 3 Oktober 2010
- <http://www.bappenas.go.id/node/116/2709/seminar-nasional-pengembangan-kerjasama-selatan-selatan/>, diakses 6 Oktober 2011.
- <http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.html>, diakses 4 Oktober 2011.
- <http://www.managementfile.com/column.php?sub=economy&id=1790&page=economy>, diakses 4 Oktober 2010.
- Jackson, Robert dan George Sorensen, *Introduction of Global Political Economy*. Oxford Press, 2008.
- Jameson, Frederick, *The Cultural Logic of Late Capitalism*. London: Verso, 2000.
- James, Jeffrey, *Globalization and Consumption*. New York: St Martin, 2000.

Liotard, Francois. *Libidinal Economy*. Penguin Books, 1994.  
Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London dan New York: Verso, 2001.  
Storey, John, *Cultural Studies and Pop Culture*. Yogyakarta: Jalasutra, 2008

## Catatan Belakang

---

<sup>1</sup> Konseptualisasi dan definisi Kapitalisme Konsumen secara lebih komprehensif akan diulas dalam sub bab selanjutnya. Namun istilah ini diperkenalkan oleh Jean Baudrillard yang melihat bahwa Kapitalisme telah mengeksploitasi dalam dunia konsumsi.

<sup>2</sup> Arnsperger, *Critical Political Economy: Complexity, Rationality and The Logic of Post-Orthodox Pluralism*. London: Routledge, 2008, hal.32.

<sup>3</sup> [http://www. antaraneews.com/hhgh/8999](http://www.antaraneews.com/hhgh/8999). diakses 5 Mei 2011

<sup>4</sup> <http://www.vibiznews.co.id/ggsh/hsgd/67.html>., diakses 6 Mei 2011

<sup>5</sup> Baudrillard, Jean, *The Mirror of Production*. Cambridge: Polity Press, 1997.

<sup>6</sup> Lyotard, *Libidinal Economy*. London: Penguin Books, 1994, hal. 77.

<sup>7</sup> Brook, *Virtual Life: The Culture and Politics of Information*. New York: City Light, 1995.

<sup>8</sup> Laclau dan Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London dan New York: Verso, 2001.

<sup>9</sup> Bell, *The Cultural Contradiction of Capitalism*. London: Basic Books, 1990.

<sup>10</sup> Jameson, *The Cultural Logic of Late Capitalism*. London: Verso, 1988.

<sup>11</sup> Hardt dan Negri, *Empire*. Harvard University Press, 2005, hal. 67.

<sup>12</sup> Ritzer, *Teori Sosial Postmoden*. Yogya: Kreasi Wacana, 2005, hal. 66.

<sup>13</sup> James, *Globalization and Consumption*. London: Blackwell, 2000, hal. 67.

<sup>14</sup> Laclau dan Mouffe, *Op. Cit.* hal. 78-90.

<sup>15</sup> Coronol, "Toward a Critique of Globalcentrism: Speculations on Capitalism's Nature" dalam Comaroff, ed., *Millennial Capitalism and Culture of Neoliberalisme*. London: Duke University Press, 2001, hal. 63-84.

<sup>16</sup> Giddens, *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press, 1984, hal. 34.

<sup>17</sup> Hadi dan Dharmastuti, *Laporan Akhir Studi Kebijakan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan*. Ceacos UI, Bappenas, dan JICA, 2010, hal. 45.

<sup>18</sup> Jackson dan Sorensen, *Introduction of Global Political Economy*. Oxford University Press, 2008, hal. 67.

<sup>19</sup> Harvey, "Is This Really the End of Neoliberalism?" dalam <http://kasamaproject.org/2011/03/05/david-harvey-on-neoliberal-crisis-and-class-power/> diakses 21 Maret 2011.

<sup>20</sup> Esensi pemikiran teori kritis adalah mengungkap bagaimana Kapitalisme ternyata tidak hanya menyebabkan penindasan dalam kerangka material dan infrastuktur melainkan pengetahuan sebagai basis superstruktur kesadaran juga hasil produksi dari Kapitalisme. Pengetahuan yang terkapitalisasi termanifestasikan melalui logika teknis yang justru menghasilkan *unconsciousness*. Disinilah konsepsi alienasi dari Karl Marx, mulai dikembangkan oleh Mazhab Frankfurt dengan memasukkan ajaran spiritualitas Hegel yang dulunya dilupakan kaum Marxis.

<sup>21</sup> <http://www.investor.co.id/tajuk/soliditas-kinerja-emiten/11267>

<sup>22</sup> <http://www.managementfile.com/column.php?sub=economy&id=1790&page=economy>

<sup>23</sup> <http://www.vibiznews.com/templateimages/economy/kons>

<sup>24</sup> <http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.html> diakses 4 Mei 2011.

<sup>25</sup> <http://infopublik.depkominfo.go.id/?page=news&newsid=1742> diakses 4 Mei 2011.

<sup>26</sup> <http://bataviase.co.id/node/325188> diakses 12 Mei 2011.

<sup>27</sup> <http://www.bappenas.go.id/node/116/2709/seminar-nasional-pengembangan-kerja-sama-selatan-selatan/> diakses 6 Mei 2011.